

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menurut Mutaqien (2006) yaitu suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari (sandang, pangan dan papan). Secara umum permasalahan kemiskinan berakibat pada hilangnya kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makan, dan rumah, selain itu juga kemiskinan ditandai dengan kurangnya kesehatan masyarakat, pendidikan yang masih rendah, kurangnya lowongan pekerjaan sehingga banyak nya pengangguran, kurangnya perlindungan hukum dan kebebasan hidup (Mutaqien, 2006). Masalah kemiskinan selain dihadapi di Indonesia, juga dirasakan oleh Negara-negara lain.

Menurut Kusumawardani (2013) dalam menganggulangi kemiskinan Perserikatan Bangsa Bangsa atau yang biasa disingkat dengan (PBB) membentuk pembangunan melenium yakni sebuah paradigma pembangunan global dimana *Millenium Development Goals (MDGs)* yang memiliki ideology social dan budaya dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, menurut Kusumawardani (2013) ada sekitar 189 Negara yang melakukan program MDGs, Indonesia juga melakukan program ini karena dalam pemerintahan di Indonesia sesuai dengan sasaran MDGs. Dalam program MDGs dalam poin pertama memiliki tujuan pokok menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah dan persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami kenaikan pada September 2013 sebesar 28,55 juta jiwa atau 11,47%. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada Maret 2013 yang sebesar 28,07 juta jiwa atau 11,37%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada bulan juni 2013 (Afrianto, 2017). Berikut perkembangan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2016 :

Tabel 1.1
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (dalam juta orang)		Persentase penduduk miskin (dalam persen)	
	Maret	September	Maret	September
2011	30,02	29,89	12,49	12,36
2012	29,13	28,59	11,96	11,66
2013	28,07	28,55	11,37	11,47
2014	28,28	27,73	11,25	10,96
S 2015	28,59	28,51	11,22	11,13
^u _m 2016	28,01	27,76	10,86	10,70

sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017.

Berdasarkan data diatas Telah banyak adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,13 jiwa di tahun 2011 dengan persentase 0,13%, di tahun 2012 mengalami penurunan persentase sangat baik yaitu 0,30 % sedangkan di tahun 2015 terlihat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,86 jiwa per

september 2014, akan tetapi tidak berdampak pada peningkatan angka persentase jumlah penduduk miskin. Adapun di tahun terakhir menunjukkan penurunan jumlah dan angka persentase penduduk miskin dengan sangat baik penurunan jumlah penduduk miskin per maret 2015 sampai september 2016 sebanyak 0,83 jiwa sedangkan persentasenya terhitung menurun 0,43%.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat Fluktuatif, sehingga dilakukan upaya atau cara penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara melaksanakan program penggulangan kemiskian. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2003) kemiskinan diakibatkan oleh tidak meratanya kepemilikan sumberdaya dimana hal tersebut mengakibatkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemudian menurut Jonnadi dan Aimon (2012) kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena sumber daya manusia yang rendah berarti produktivas rendah, upahnya pun rendah. Kemiskinan juga disebabkan oleh perbedaan akses dan modal.

Dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan diperlukan cara-cara pendekatan dan penggulangan yang terpadu, menyeluruh dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menjelaskan bahwa perlu dilakukan koordinasi dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan penanggualngan kemiskinan. Selain itu dalam pasal 15 menjelaskan menaggulangi kemiskian baik tingkat

Provinsi maupun tingkat kabupaten perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinanyang disebut TKPK. Dimana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan, mengevaluasi dan memonitoring setiap program yang telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Tim Nasional. Salah satu Provinsi yang menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yakni Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.1

Presentase kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

<i>Kabupaten/Kotal Regency/City</i>	<i>Garis Kemiskinan/ Poverty Line (Rp/kap /bulan Rp/cap/month)</i>	<i>Penduduk Miskin/ Poor People</i>	
		<i>Jumlah/ Total</i>	<i>%</i>
1 Kulonprogo	265 575	84,67	20,64
2 Bantul	301 986	153,49	15,89
3 Gunungkidul	243 847	148,39	20,83
4 Sleman	306 961	110,44	9,5
5 Yogyakarta	366 520	36,6	8,67
DIY	321 056	532,59	14,55

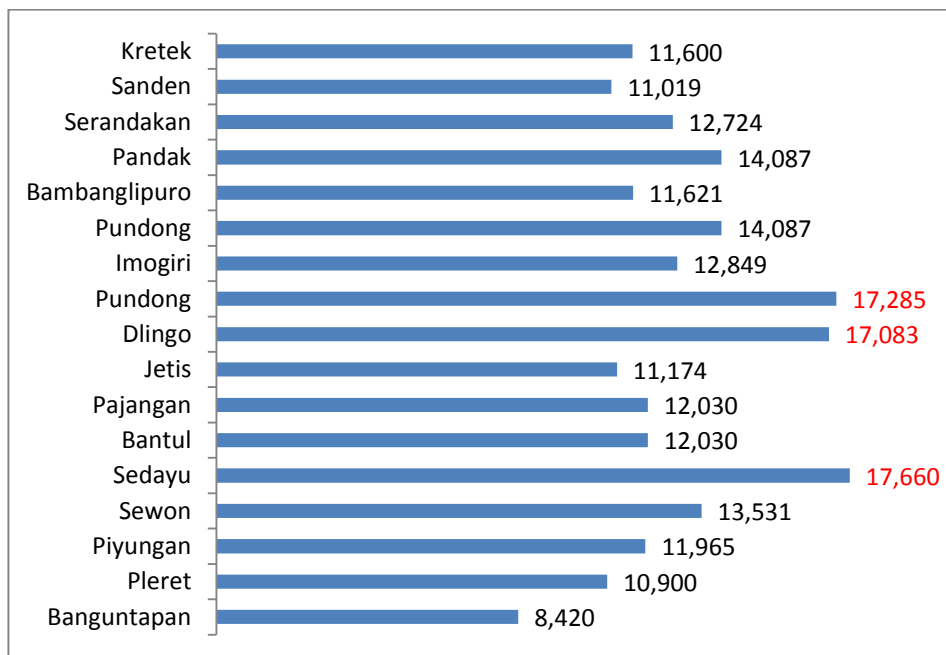
Sumber <http://yogyakarta.bps.go.id> Tahun 2016

Badan Pusat Statistik memaparkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul berada dalam urutan ke 3(tiga) dari 5(lima) kabupaten/kota dengan presentase kemiskinan terendah. Berdasarkan presentase kemiskinan di Kabupaten Bantul mencapai 15,89% jumlah penduduk miskin dengan jumlah 153,49 ribu penduduk miskin. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan dilakukan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Bantul menjadikan tujuan utama yang harus dilaksanakan oeh pemerintah setempat. Dimana telah tertera dalam Visi Kabupaten Bantul pada

point ke 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul. Selain itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dimana peraturan daerah tersebut berisikan dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan cara atau langkah-langkah koordinasi penyelenggaraan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk menanggulangi kemiskinan dibutuhkan perencanaan, penetapan sasaran, monitoring, evaluasi, keterpaduan program, serta efektivitas anggaran dalam penguatan kelembagaan di Kabupaten Bantul.

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk miskin di Bantul Tahun 2016

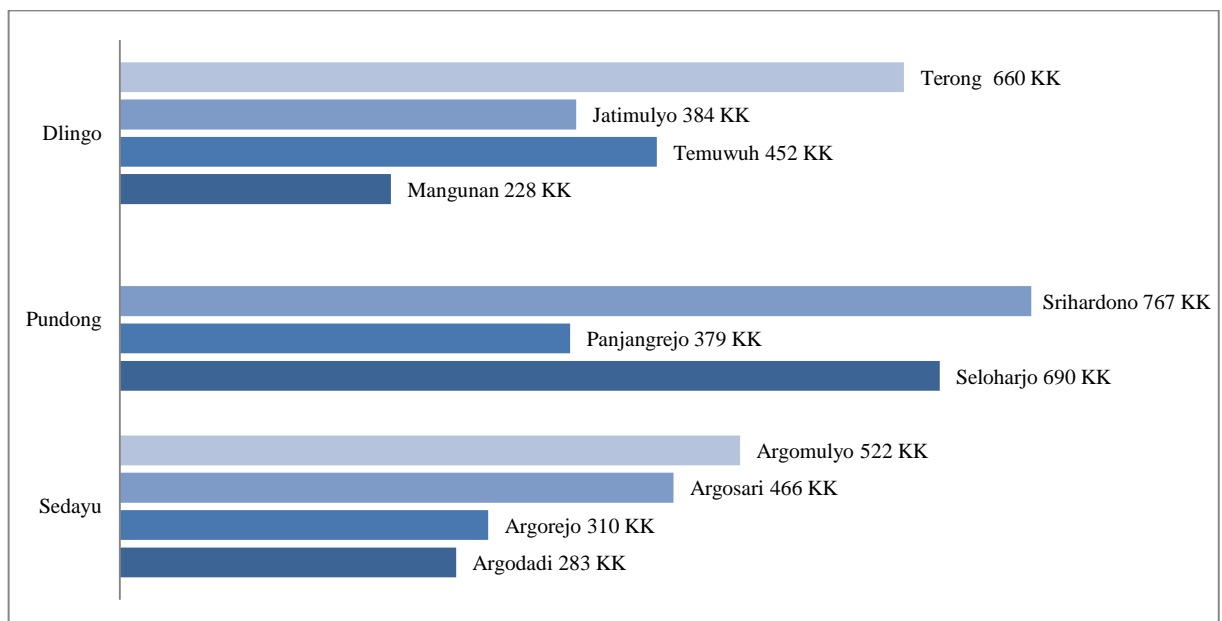


Sumber: BKK & KB 2016 dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-202

Berdasarkan data di atas diketahui 3 Desa termiskin di Bantul adalah Desa Sedayu, Desa Pundong, dan Desa Dlingo. Menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) setempat mencatat angka kemiskinan di Di Sedayu 17.660 penduduk miskin, di Desa Pundong 17,285 dan Desa Dlingo 17.083 jumlah penduduk miskin. Dalam menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan agenda pemerintah Indonesia, dimana Ketua TKPK Kabupaten Bantul membuat surat Keputusan Pembentukan TKPK di Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam menanggulangi atau memberantas kemiskinan.

Table 1.2

Rekaptulasi data kartu keluarga miskin Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Dlingo dalam wilayah Kabupaten Bantul tahun 2016



Sumber: Simnangkis.bantulkab.go.id

Berdasarkan ketiga table diatas dapat dilihat bahwa di Desa Argomulyo, Desa Srihardoni dan Desa Terong tahun 2016 merupakan desa termiskin di 3 kecamatan tersebut. Jumlah jiwa penduduk miskin di Desa Argomulyo sebanyak 522 jiwa kartu keluarga yang miskin, di Desa Srihardono sebanyak 767 jiwa penduduk miskin dan di Desa Terong sebanyak 660 jiwa kartu keluarga yang miskin. Oleh karena itu pemerintah setempat berupaya menanggulangi kemiskinan yang ada di masing-masing desa.

Dalam (kec-sedayu.bantulkab.go.id) ketua TKPK Kecamatan Sedayu Ibu Novi Astuti, ST.MT susunan pengurus TPKP yang baru sesuai SK Camat No. 17 tahun 2016. Perlu melakukan validasi data gakin dan berharap berdasarkan data kemiskinan yang valid mampu meningkatkan tata kelola pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan. Sidik, H (2015) Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan produk unggulan di tiap desa untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan terutama kecamatan Sedayu. Sedayu menjadi fokus dalam pemkab mengatasi kemiskinan, salah satu upaya dengan menggarap produk unggulan daerah setempat. Selain itu, Sedayu menjadi focus penanggulangan kemiskinan karena selama dua tahun berturut-turut menempati posisi pertama dari 17 Kecamatan di Bantul, setelah sebelumnya ada di Kecamatan Dlingo. Secara umum kemiskinan di Sedayu di sebabkan oleh penghasilan warga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya pemerintah juga memiliki program mulai dari raskin, program keluarga harapan (PHK), pelatihan dan pemberdayaan usaha mikro berupa dana bergulir, namun dampaknya tidak langsung terasa. Selain itu Camat Sedayu Priyo

Atmaja mengatakan kemiskinan cukup tinggi di Sedayu diakibatkan oleh sumber daya manusia (SDM) sebab mayoritas penduduk diwilayahnya adalah petani penggarap. Kondisi wilayah sedayu bagian selatan juga berupa pegunungan sehingga akses jalan masih cukup sulit, bahkan di wilayah tersebut jarang ditemukan sekolah lanjutan untuk tingkat baik SMA maupun SMK.

Selain itu, Tingkat kemiskinan di Dlingo tergolong parah (pola konsumsi antara 50,1 – 75 % dari total pengeluaran). Kemiskinan di daerah penelitian berhubungan dengan rendahnya sumberdaya manusia; jumlah anggota rumahtangga miskin yang sedikit; kepemilikan aset ternak dan barang elektronik serta kendaraan yang sedikit; dan waktu tempuh menuju lokasi sekolah dasar dalam satu kali perjalanan. Darmansyah (2015) Kecamatan Dlingo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki persentase (%) penduduk miskin terbesar pada tahun 2013 yaitu 19,46 % (TPAK Kabupaten Bantul, 2013). Berdasarkan kondisi wilayahnya, Kecamatan Dlingo berada di ketinggian antara 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat menghambat aksesibilitas penduduk. Namun tahun 2016 ini mengalami peningkatan Dlingo menduduki posisi ke 3 termiskin di Bantul.

Kemiskinan merupakan kondisi yang selalu mengalamai perubahan jika dilihat dari kondisi yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Untuk itu dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat kondisi yang dihadapi sekarang. Kemiskinan banyak menimbulkan permasalahan, oleh sebab itu penanggulangan

kemiskinan harus segera dilaksanakan dengan baik dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Menurut Winarno (2007) Kebijakan yang dilakukan pemerintah akan percuma jika tidak dilakukan dan di implemetasikan. Oleh sebab itu kebijakan yang telah diambil merupakan suatu alternative pemecahan masalah yang perlu diimplemtasikan baik oleh badan administrasi ataupun oleh agen pemerintah di tingkat bawah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengambil tema mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. karena ingin mengetahui lebih dalam atau lebih cermat lagi mengenai Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan bagaimana implementasi kebijakan penagulangan kemiskinan di Kecamatan Sedayu oleh karena itu penulis disini mengambil judul **“Pengaruh Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Study Comparasi Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono Kecamatan Pundong, Dan Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2016”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016?
2. Bagaimana implementasi program penagulangan kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016?
3. Bagaimana pengaruh implementasi program penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kondisi kemiskinan di di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016.
2. Untuk menjelaskan implementasi program penanggulangan kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016.
3. Untuk menjelaskan pengaruh implementasi program penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi Ilmu Pemerintahan Daerah sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai masukan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan.

- b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang implementasi kebijakan dan dapat dijadikan sebagai referensi/acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Table 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Nugraha Utama Sudarsana (2015)	Rencana Partisipatif dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan	Hasil penelitian ini dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan program desa percontohan penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan dengan melibatkan berbagai pihak. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan program tersebut beserta keterlibatan masyarakat didalamnya termaksud factor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Perencanaan program didahului dengan identifikasi kondisi dan kebutuhan wilayah dan masyarakat sasaran. Perencanaan program desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down dan teknokratis. Pendekatan partisipatif belum sepenuhnya diadopsi mengingat masyarakat miskin sebagai sasaran program belum dilibatkan dalam penyusunan rencana. Pendekatan teknokratis ditandai dengan digunakannya serangkaian metode ilmiah yaitu survey dan analisis untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program didorong oleh factor peran pemangku kegiatan, kesadaran masyarakat serta system social dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dihambat oleh factor jenis pekerjaan dan kepedudukan dalam masyarakat.
2.	Asna Aneta (2010)	Implementasi Kebijakan Program	Hasil penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk Implementasi kebijakan

		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo	penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu focus group discussion dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bentuk implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan P2KP, pemerintah setempat juga antusias dalam melaksanakan program tersebut. Factor yang menyebabkan keberhasilan penelitian ini adanya factor komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan sikap pelaksana.
3.	Emmy Latifa (2011)	Harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berorientasi pada MDGs.	Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan MGDs. Belum sesuai atau harmonisnya diakibatkan oleh perbedaan dalam arti kemiskinan. Apabila dikaji dengan cermat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, adanya perbedaan antara peraturan dengan yang lainnya baik secara vertical maupun horizontal. Oleh sebab itu perlu dilakukan redefinisi kemiskinan. Langkah selanjutnya diikuti dengan peraturan dan sasaran dalam satu dokumen peraturan yang sesuai dengan pengentasan kemiskinan yang merupakan program unggulan dari pemerintah.
4.	Marliya (2016)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu	Berdasarkan hasil penellitian program penanggulangan kemiskinan di kota Palu bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penerima bantuan didasarkan pada aspek yang dibahas dalam penelitian. Terdapat empat aspek yang menjadi focus kajian yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi dalam penelitian belum berjalan secara

			baik seperti yang diharapkan demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Factor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin kota Palu adalah pada aspek disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin
5.	Asiah Hamzah (2012)	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Kelaparan Di Indonesia: Realita Dan Pembelajaran	Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengentasan kelaparan ataupun kemiskinan yang terjadi di Indonesia perlu dilakukannya Multisector dengan adanya bantuan proses dari berbagai pihak. Dalam menangani permasalahan ini harus dilakukan penanganan yang sungguh-sungguh. Pengentasan kemiskinan yang pemerintah di Indonesia harus lebih serius dalam menjalankan program pengentasan kelaparan dan kemiskinan dengan bantuan program berbasis pemberdayaan masyarakat, serta focus terhadap pelaksanaan strategi kemandirian pangan, berupa kemandirian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan memelihara cadangan pangannya masing-masing.
6.	Faisal dan Erman (2014)	Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2012)	Hasil penelitian ini diketahai bahwa kemiskinan di Kabupaten Meranti diakibatkan oleh berbagai factor baik itu sandang, pangan, papan, ataupun infrastruktur dan budaya. Selain itu kebijakan penanggulangan Kemiskinan yang dibuat TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan baik dan sesuai dengan instrumen penanggulangan kemiskinan yang tetapkan TNP2K. Namun dalam mengintervensi target bidang penanggulangan, TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti hanya secara

			<p>menganalisa dari hasil pemantauan program yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada SKPD tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah ini tidak melakukan tindakan lebih lanjut, tidak adanya rumusan ataupun dokumen strategi dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Selain itu terdapat factor penghambat dalam upaya penanggulanagn kemiskinan, diantaranya masalah komunikasi yang diakibatkan oleh letak geografi kabupaten Meranti yang terdapat banyak pulau, dan masih minimnya jumlah staf dan fasilitas penyeleggaraan pemerintah yang masih minim belum adanya dokumen strategis penaggulanagan kemiskinan Daerah (SPKD) selain itu struktur organisasi belum tertata dengan baik, berdasarkan hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan TKPK dalam upaya penanggulangan kemiskinan.</p>
7.	I Wayan Rusastra (2011)	Reorientasi Paradigma Dan Strategis Pengentasan Kemiskinan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global	<p>Hasil penelitian ini pemerintah dan masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian nasional melalui pengembangan infrastruktur, investasi, dan iklim ekonomi yang kondusif. Optimalisasi alokasi dana pembangunan untuk program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama peningkatan pendapatan penduduk miskin, memegang peranan sentral. Komplementasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan, didukung dengan integrasi ekonomi desakota, akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan</p>

			di perdesaan dan secara nasional.
8.	Motic Deviano Novandric (2015)	Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penaggualan kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai Desa Model jika dilihat dari Model implementasi S.Smith yang melihat pada 4 aspek dalam implementasi yaitu idealized policy, target group, implementing organization dan environment factors. Pada faktor Idealized Policy menilai bahwa komunikasi yang terjalin antar organisasi hanya melalui Musrenbang, selain itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap persiapan kegiatan yang didalamnya mencakup identifikasi sasaran dan pembentukan kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran pelaksana kebijakan yang seharusnya memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tujuan diberikannya bantuan ternak masih kurang dan kurangnya pengawasan serta sikap tegas pemerintah yang tidak memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan menjual bantuan ternak juga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi penanggulangan kemiskinan melalui Desa Model.
9.	Taurusman Situmeang (2013)	Proyek penaggualan kebijakan penanganan kemiskinan di perkotaan (studi Implementasi	Hasil dalam penelitian ini adanya Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program P2KP di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang: a. Faktor pendukung yang ada adalah:

		Kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di Desa Jatikerti Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)	(1) dukungan aparat desa, (2) adanya azas keterbukaan dan program P2KP, dan (3) respon masyarakat terhadap program P2KP. b. Faktor penghambat adalah: (1) rendahnya kepercayaan masyarakat, terutama pada awal sosialisasi, (2) rendahnya kinerja Faskel, yaitu kurangnya wawasan, dan (3) rendahnya tanggung jawab KSM.
10.	Arius Jonaidi (2012)	Analisis pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: (1) Pengaruh pengangguran, kemiskinan, investasi dan pertumbuhan ekonomi. (2) Pengaruh harapan hidup, melek huruf, investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Studi ini menggunakan data panel atau cross-time series series dengan data time series dari tahun 2005-2009, dan persentasenya adalah bahwa ada 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrik dengan menggunakan model persamaan simultan (model persamaan simultan). Hasilnya menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan akses terhadap modal, kualitas pendidikan (melek huruf dan peningkatan lama pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) orang miskin dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam usaha

			<p>selama periode 2000-2009. Tingkat pengangguran, dan investasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi investasi dalam negeri dan luar negeri, harapan hidup, melek huruf dan sekolah lebih lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan temuan ini, kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memacu pertumbuhan ekonomi melalui perluasan investasi terutama di bidang pertanian (agribisnis dan agroindustri) di daerah pedesaan dimana banyak orang miskin bergantung.</p>
--	--	--	---

Disini penulis ingin meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Bedanya dengan peneliti terdahulu ialah penulis ingin lebih memfokuskan pada Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Sedayu, Pundong dan Dlingo Kabupaten Bantul terhadap kondisi kemiskinan di di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016. Disini juga penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif karena ingin menjelaskan tentang pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

F. Kerangka Teori Dasar

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan yang memiliki arti multimedisional yakni persoalan terkait sosio kultur, kondisi ekonomi dan persoalan structural. Menurut Badan Pusat Stastitik dalam Yunowo (2006) menyatakan bahwa kemiskinan yakni suatu kondisi terkait nilai standar

kebutuhan minimum berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Dimana garis kemiskinan adalah jumlah pengeluaran yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu berupa sandang, pangan ataupun papan. Dalam dokumen Bappenas Tentang Strategi Nasional Penanggulangan kemiskinan (2014) kemiskinan dapat diartikan bahwa kondisi individu atau seseorang baik itu sekelompok atau individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan menurut Chamber dalam Yunowo (2006) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang ditandai dengan harapan hidup yang rendah, lingkungan yang kumuh, kekurangan gizi, tuna aksara, wabah penyakit, dan mortalitas bayi yang tinggi. Factor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya pendapatannya rendah, kelemahan fisik, isolasi dan tidak memiliki kekuatan dalam hal tawar menawar ataupun politik.

Kemiskinan dapat dijelaskan secara berbeda sesuai dari sudut pandang penglihatannya tentang kemiskinan tersebut. Cara pandang yang berbeda dapat menjelaskan bagaimana sifat, kondisi dan konteks dalam kemiskinan dapat dipahami, sebagaimana sebab kemiskinan diidentifikasi, dan bagaimana mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dibagi menjadi 4 bentuk menurut Adit dalam Alfana (2014):

- a) Kemiskinan kultural, kemiskinan ini mengarah terhadap sikap persoalan seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, maksudnya tidak maunya berusaha untuk memperbaiki

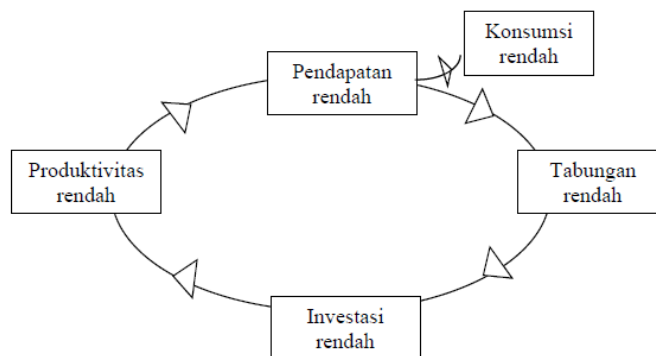
tingkat kehidupan, kehidupan yang bermalas-malasan, pemborosan, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- b) Kemiskinan Struktural, situasi ini disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu social budaya dan social politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.
- c) Kemiskinan absolut, suatu kondisi terkait nilai standar kebutuhan minimum berada dibawah garis kemiskinan yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan)
- d) Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, kemiskinan ini terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.
- e) Kemiskinan relative, kemiskinan ini dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan yang kurang merata.

Dari definisi kemiskinan di atas dapat diketahui bahwa secara umum kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang berada dalam keadaan kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan dan ketidaklayakan hidup menurut standar tertentu. Kemiskinan tidak hanya didefinisikan berupa materi saja tetapi juga banyak hal yang lebih kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang luas dalam menyerap apa

yang didefinisikan sebagai kemiskinan. Di bawah ini adalah gambar lingkaran kemiskinan yang akan menjelaskan tentang bagaimana budaya dari kemiskinan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yakni sebagai berikut

Gambar 1.3
Lingkaran Kemiskinan



Sumber : World Bank, 2013

Berdasarkan gambar lingkaran kemiskinan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh dengan konsumsi rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah hal tersebut yang menyebabkan individu atau kelompok dapat dikatakan miskin.

Pada umumnya, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah perdesaan, dengan mata pencaharian petani dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sector ekonomi tradisional. Dengan demikian penyebab kemiskinan yang terjadi dipedesaan diantaranya sempitnya lahan pertanian yang mereka miliki atau tidak produktifitasnya lagi lahan pertanian yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan sehingga

berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan dan produktivitas dalam mengelola usaha tani, tidak ada pekerjaan sampingan, besarnya jumlah tanggungan, pendapatan yang tidak menentu sebagai akibat usaha yang sangat tergantung dengan musim serta usia tanaman yang mereka miliki sudah cukup tua sehingga kurang produktif dalam menghasilkan produksi. Berikut adalah papan terkait kondisi kemiskinan :

a) Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dari rumah tangga tersebut, baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung yang tinggal satu rumah tapi belum bekerja. Di Negara berkembang seperti Indonesia, banyak yang menganggap anak adalah investasi.

Meskipun peningkatan penghasilan digunakan untuk menambah jumlah anaknya, akan tetapi lebih baik peningkatan penghasilan digunakan untuk menambah kualitas anaknya melalui pendidikan. Sehingga ada kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari pada orang tuanya di masa depan. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga semakin besar pula kebutuhan yang dipenuhi. Sehingga terjadilah penerimaan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga tersebut berada dalam keadaan tidak seimbang atau miskin hal ini dikatakan oleh Zartika (2016).

Jumlah tanggungan keluarga ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan masalah kemiskinan, dimana menurut Zartika (2016) bahwa besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan karena semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak maka jumlah penghasilan yang dibutuhkan juga akan semakin besar, apabila penghasilan yang dibutuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan.

b) Pendidikan dan Keterampilan Rendah

Menurut Arfida (2002) pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupan secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh perluasan pendidikan lebih tinggi berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemampuan dalam masyarakat.

Jadi pada dasarnya, sumber daya manusia yang berkualitas itu dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa tenaga kerja yang mempunyai pendidikan tinggi akan mampu bersaing untuk memperoleh

pekerjaan yang layak sehingga diperoleh pendapatan yang layak pula. Jadi, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka akan dapat meningkatkan kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya serta pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c) Pendapatan Rendah

Pendapatan atau penghasilan adalah bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa sumbangan seseorang terhadap proses produksi menurut teori Fisher dalam Nopirin (1996 : 130), tentang konsep yang berhubungan dengan pendapatan menyebutkan bahwa permintaan uang atau transaksi tergantung dari pendapatan, makin tinggi tingkat pendapatan maka semakin besar pula keinginan uang kas untuk bertransaksi.

Dari kacamata tenaga kerja, upah dianggap sebagai sumber penghasilan pokok atau disebut *human income*. Sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja ingin agar mencukupi. Oleh karena itu, tenaga kerja mempunyai konsep tersendiri tentang seberapa tinggi upah yang sebaiknya. Dari berbagai faktor yang dijadikan pertimbangan mereka, ada dua buah yang penting dalam kaitannya dengan pembahasan sekarang ini. Pertama, tingkat upah perlu mencukupi kebutuhan, yang kedua tingginya upah sesuai dengan harapan ekonomis. Kebutuhan hidup seseorang biasanya tidak hanya harus mencukupi kebutuhan bagi diri sendiri, melainkan

juga untuk seluruh anggota keluarga yang intinya terdiri atas anak dan istri. Dalam konsep *taxtended family*, kepala rumah tangga sering kali menanggung kewajiban elementasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, menjadi pertimbangan utama biasanya hanya keluarga inti (Arfida, 2002 :155).

Kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam standar pendapatan nasional dan salah satu tolak ukur tingkat pendapatan terhadap kemiskinan menurut Hasibun (2002: 132) sebagai berikut:

- 1) Pendapatan rendah yakni, Dalam setahun pendapatan rendah sekitar Rp.1000.000-Rp.10.000.000 pertahun atau rata-rata Rp.750.000 perbulan; Tidak memiliki pekerjaan tetap; Tidak memiliki tempat tinggal tetap (sewa): Tingkat pendidikan terbatas.
 - 2) Pendapatan sedang yaitu Rp.10.000.000- Rp.25.000.000 pertahun atau rata-rata Rp.1.250.000 perbulan; Memiliki pekerjaan tetap; Memiliki tempat tinggal sederhana ; Memiliki tingkat pendapatan tinggi
 - 3) Pendapatan tinggi yaitu Rp.25.000.000- Rp.50.000.000 pertahun atau rata-rata Rp.2.083.333 perbulan; Memiliki lahan dan lapangan pekerjaan; Memiliki pekerjaan tetap; Memiliki tingkat pendidikan.
- d) Kepemilikan Sarana Produksi yang masih sederhana dan Etos kerja.

Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana menurut Zartika (2016) yakni dalam melakukan kegiatan menggunakan alat-alat yang masih sederhana dan alakadarnya.

Factor lain menurut Kuncoro dalam Zartika (2016) penyebab kemiskinan disebabkan oleh 2 faktor diantara nya:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul dengan adanya tidak meratanya kepemilikan SDM yang mengakibatkan pendapatan yang timpang. Penduduk miskin biasanya hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang dimiliki rendah.
- b. Kemiskinan juga diakibatkan adanya perbedaan sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitas rendah, upah rendah. Rendahnya sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
- c. Kemiskinan juga diakibatkan oleh perbedaan akses daam modal.

2. Implementasi kebijakan

a) Konsep implementasi kebijakan

Menurut Pressman dan Wildasky dalam Hill and pitter Hupe (2007) mengatakan bahwa:

“We can work neither with a definition of policy that excludes any implementation nor one that includes all implematation. There must be a starting point. If no action is begun, implementation cannot succeedor fail without a goal against which to judge it”.

Pada prinsipnya implementasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan agar kepentingan dan harapan public dapat terwujud untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Dalam teori implementasi Kontentekstualissi adanya hubungan antara implementasi dan kebijakan yang bersifat spesifik sebagai respon tertentu atas spesifikasi problem dalam masyarakat. Proses kebijakan ini dapat dilihat dari dua hal yakni aktivitas dan produk. Dimana aktivitas dan legitimasi menghasilkan keputusan diantaranya:

- 1) Interpretasi terhadap kebijakan
- 2) Perencanaan (menyusun rencana, terhadap tindakan untuk melakukan keputusan kebijakan)
- 3) Pengadaan sumber daya (alam, teknologi, manusia maupun sumber daya keuangan)
- 4) Penyedia layanan dan jasa
- 5) Pengorganisasian (pendayagunaan organisasi ublik, pelibatan lembaga-lembaga dan adanya koordinasi kegiatan)

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan public, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementsi. Dengan adanya tiga unsur tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. (Subarsono, 2005: 90-92) Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat diartikan untuk mengetahui apa yang terjadi sesudah program dirumuskan dan diberlakukan.

Sedangkan Suranto (2013: 21) secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun untuk mencapai sasaran tersebut. Sejatinya bahwa implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ide-ide yang merupakan keluaran dari pembuat kebijakan. Selain itu, Suranto (2013:35) menyatakan bahwa proses umum implementasi dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran telah dispesifikasi, program-program telah didesain, dan dana dialokasikan untuk percepatan tujuan. Kegiatan hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar (*the content of policy*) dan konteks kebijakan (*the content of policy*) yang terkait dengan formulasi kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*). Adapun isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Siapa pelaksana program

6. Sumber daya yang dikerahkan

Dalam rangka untuk memetakan faktor-faktor implementasi kebijakan, yang pertama adalah harus mengklarifikasi tujuan implementasi kebijakan. Hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan adalah kesuksesan. Oleh karena itu implementasi kebijakan yang sukses adalah praktek senilai bercita-cita untuk. Implementasi kebijakan yang sukses adalah aksi strategis diadopsi oleh pemerintah untuk memberikan keputusan kebijakan yang dimaksudkan dan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan dalam hal implementasi kebijakan menyiratkan mencapai fungsi yang diharapkan diperlukan oleh pemangku kepentingan diidentifikasi. Sukses dalam hal ini kemudian inisiatif implementasi dasar (Giacchino & Kakabadse, 2003: 140). Menurut definisi ini sukses, dalam prakteknya, hanya beberapa kebijakan dapat dianggap sebagai sukses.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni Faktor keberhasilan elemen dari proyek itu, dalam kebanyakan kasus, para pelaksana dapat mengontrol untuk meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses. Lingkungan organisasi juga mempengaruhi organisasi sangat kuat, dan organisasi mungkin tidak dapat mengendalikan lingkungan itu. Oleh karena itu faktor keberhasilan mencakup unsur-unsur bahwa organisasi mampu mengendalikan dan mereka tidak dapat mengendalikan - pembahasan faktor-faktor ini mengacu pada temuan Giacchino dan Kakabadse (2003: 141).

Adanya faktor yang berbeda terkait faktor-faktor keberhasilan hal ini telah mengidentifikasi berbagai macam faktor keberhasilan yang berbeda dalam bidang

studi yang beragam seperti implementasi kebijakan, manajemen strategis, reformasi administrasi, manajemen perubahan dan manajemen proyek

Tabel 1.4
Ringkasan keberhasilan faktor implementasi

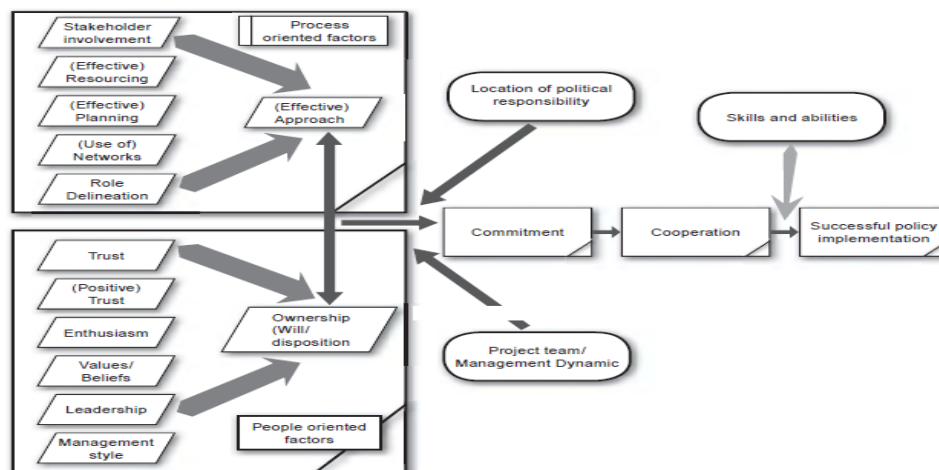
Faktor keberhasilan	Pengertian
(Efektif) Pendekatan	proses yang baik dan terstruktur untuk implementasi. [Ditandai dengan] kejelasan visi, melalui perhatian terhadap detail dan cepat pengambilan keputusan.
<i>Positive Attitude</i> (disposisi)	Seorang optimis, disposisi berorientasi tim dan tekad gigih untuk berhasil.
<i>Commitment</i> (SDM)	Sebuah kemauan politik dan administrasi yang nyata dan terlihat untuk menyampaikan kebijakan.
<i>Cooperation</i> (disposisi)	perilaku kolaboratif atau kerja sama antara para pemangku kepentingan untuk kebijakan, [ditandai dengan] tujuan keselarasan, pengembangan hubungan pribadi yang kuat, dan kemauan yang tinggi untuk berbagi keterampilan dan informasi.
(Efektif) <i>planning</i>	Perencanaan Organisasi rinci kegiatan.
<i>Efektif/Resourcing</i> (sumber daya)	penyebaran sumber daya terampil dan termotivasi dalam jumlah yang cukup untuk memberikan massa kritis.
<i>Enthusiasm</i> (struktur birokrasi)	Tingkat tinggi dari motivasi pribadi / tim, [ditandai dengan] keyakinan intrinsik dalam kebijakan, kehadiran insentif dan dukungan politik terlihat.
Kepeimpinan (komunikasi)	Kemampuan untuk mengembangkan dan perintah, [ditandai dengan] kejelasan visi dan mandat yang sah.
Lokasi tanggung jawab (sumber daya)	Politik kekuasaan yang berasal dari tempat atau posisi yang memegang kepemilikan politik untuk kebijakan, dan kemampuannya untuk perintah otoritas atas penyebaran sumber daya.
Gaya manajemen (komunikasi)	Perilaku antusias dan optimis manajemen, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang berlaku.
<i>Ownership</i> (disposisi)	Sebuah dirasakan negara milik, dan tanggung jawab untuk, program implementasi kebijakan.
Tim Proyek / Manajemen dinamis	Kehadiran sekelompok individu dengan keahlian yang berbeda namun saling melengkapi dan keahlian, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.
Peran delineasi (<i>role</i>)	adanya tanggung jawab antara individu, terutama

<i>delineation</i>)	antara politisi dan pegawai negeri sipil.
Keterampilan dan kemampuan (<i>Skills and abilities</i>)	Kemampuan dan akal dari individu yang terlibat dalam pelaksanaan [ditandai dengan] kualitas seperti pengalaman yang luas, pelatihan yang memadai dan kualifikasi, dan pendekatan praktis untuk manajemen kebijakan.
Keterlibatan stakeholder	Luas dan konsultasi aktif dengan orang atau badan cenderung mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, kebijakan tersebut.
Kepercayaan	Sebuah tingkat kepercayaan yang tinggi pada orang yang terlibat dalam inisiatif pelaksanaan, [ditandai dengan] keyakinan bahwa individu tidak akan menyabotase inisiatif, atau menyebabkan kerusakan yang disengaja.
<i>use of networks</i> (komunikasi)	Memanfaatkan hubungan pribadi-informasi seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan akses ke, atau kontrol atas, sumber daya.
<i>Values/beliefs</i> (struktur birokrasi)	keyakinan Rakyat 'kebenaran' atau 'kebaikan' dari inisiatif kebijakan, karena konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Sumber: (Giacchino dan Kakabadse, 2003: 144)

Faktor keberhasilan menurut Giacchino dan Kakabadse (2003: 143) dari berbagai tingkat pentingnya, tercantum dalam Tabel 1.4 Dari tabel, diketahui faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menjalankan implementasi.

Gambar 1.4
Hubungan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan



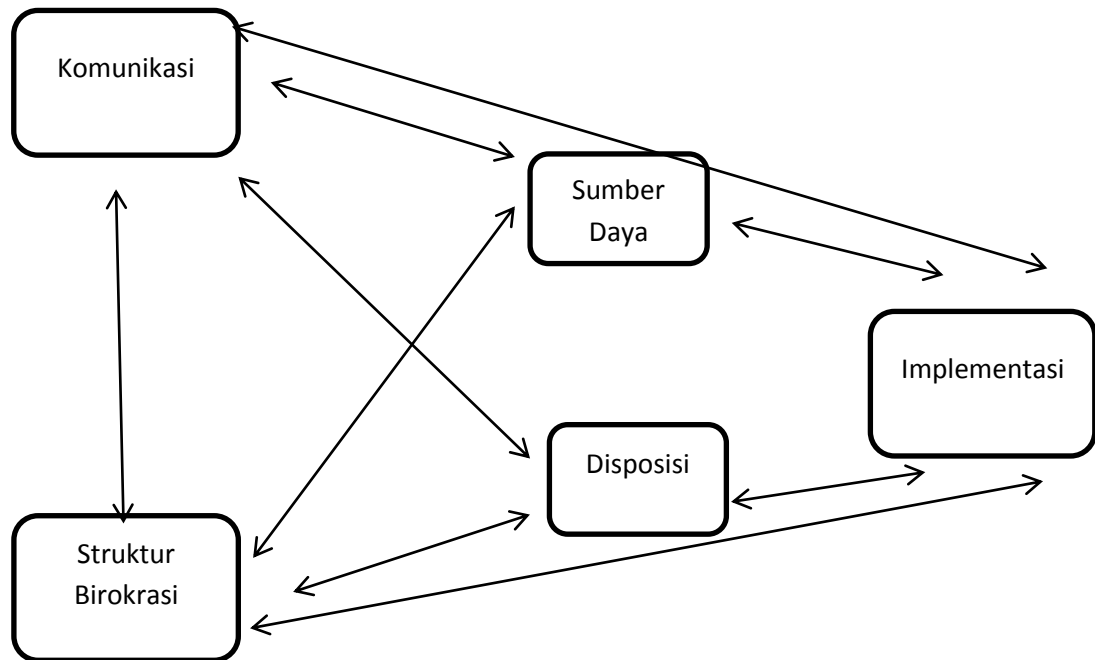
Sumber: Giacchino dan Kakabadse, 2003: 145

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan implementasi diperlukan faktor-faktor diantaranya Komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, diantaranya:

1. komunikasi berisikan Leadership, penggunaan jaringan dan Gaya manajemen
2. Sumber daya yang berisikan Lokasi tanggung jawab dan komitmen terkait kemauan politi, administrasi
3. Disposisi yang berisikan Cooperation, Positive Attitude , Ownership (disposisi)
4. Struktur birokrasi yang berisikan Enthusiasm dan nilai-nilai/ keyakinan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat dibutuhkan dalam keseluruhan proses kebijakan. Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variable dan factor-faktor yang saling berhubungan. Namun berdasarkan sudut pandang yang berbeda dalam menentukan fariabel juga mempengaruhi keberhasilan implemtasi kebijakan. Untuk itu akan dipaparkan Model Implementasi kebijakan Edward menurut Subarsono (2005) dibutuhkan faktor-faktor komunikasi, Sumber-sumber,kecenderungan atau tingkah laku (disposisi), dan struktur birokrasi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut

Gambar 1.5
Variable Model Implementasi



Sumber : Subarsono 2005

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif harus menentukan keputusan kebijakan dan perintah pemerintah kepada personil yang tepat. Tujuan sasaran harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distori implementasi. Jika kebijakan akan diimplementasikan maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya dipahami tetapi petunjuk tersebut harus jelas, Subarsono (2005).

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan, Subarsono (2005).

Menurut Tontowi (2010), Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaku atau pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif Winarno (2014). Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni

komoetsisi implementor dan sumber daya financial, selain itu suatu kebijakan hanya akan menjadi teori saja tanpa ada sumber daya.

Sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan terkait pelaksanaan program yakni adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang telah diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat pada tidak dapat dilaksanakan program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan yakni meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Manajemen SDM sangat dibutuhkan terutama manajemen sumber daya manusia yang baik karena dengan SDM yang baik mampu meningkatkan kinerja program. Selain itu, implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lainnya yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan program, kewenangan untuk menentukan program, kewenangan untuk membelanjakan /mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf. Sedangkan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa adanya fasilitas maka mustahil suatu program dapat berjalan. Program-program pemberdayaan

masyarakat harus adanya dukungan dengan sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat memahami proses pelaksanaan program.

3) Disposisi (sikap pelaksanaan)

Menurut Subarsono (2005) Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan

kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Hal-hal yang harus dicermati pada variable disposisi menurut Tontowi (2010), adalah :

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat penting. Menurut Winarno (2014) Salah satu aspek struktur yang penting adalah adanya standard operating procedures (SOP). Karena SOP merupakan pedoman bagi implementor dalam bertindak. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang merekamiliki dalam menjalankan kebijakan. Suatu organisasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan diantaranya yang dijelaskan oleh Subarsono (2005) diantaranya :

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- b) Sumber-sumber politik suatu organisasi (adanya dukungan anggota legislative dan eksekutif)
- c) Tingkat pengawasan birokrasi terhadap keputusan sub unit dan proses dalam badan pelaksanaan.
- d) Vitalisasi suatu organisasi
- e) Tingkat komunikasi terbuka

Salah satu aspek struktur yang penting adalah Standard Operating Procedures (SOP) yang berguna untuk pedoman para pihak pelaksana dalam melaksanakan program-program yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kekeliruan dilangan yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengimplentasian program. Dan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

3. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Tontowi (2010) Beberapa strategi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, meskipun kebijakan telah dilakukan tidak secara langsung mengurangi penyebab kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi
- b) Mempermudah lapisan social miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan social seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi dll.
- c) Penyediaan kredit-kredit untuk masyarakat lapisan bawah
- d) Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan
- e) Pengembangan kelembagaan

Implementasi penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan yaitu penagulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui institusi local. Adapun

program program pemerintah yang telah berlangsung dan telah di terapkan di seluruh sektor Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai pengentasan kemiskinan, beberapa diantaranya yaitu: PNPM, Program Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Bos Oprasional Sekolah (BOS), kesehatan (Jamkesmas/DA/SPM dll) Darmansyah (2015).

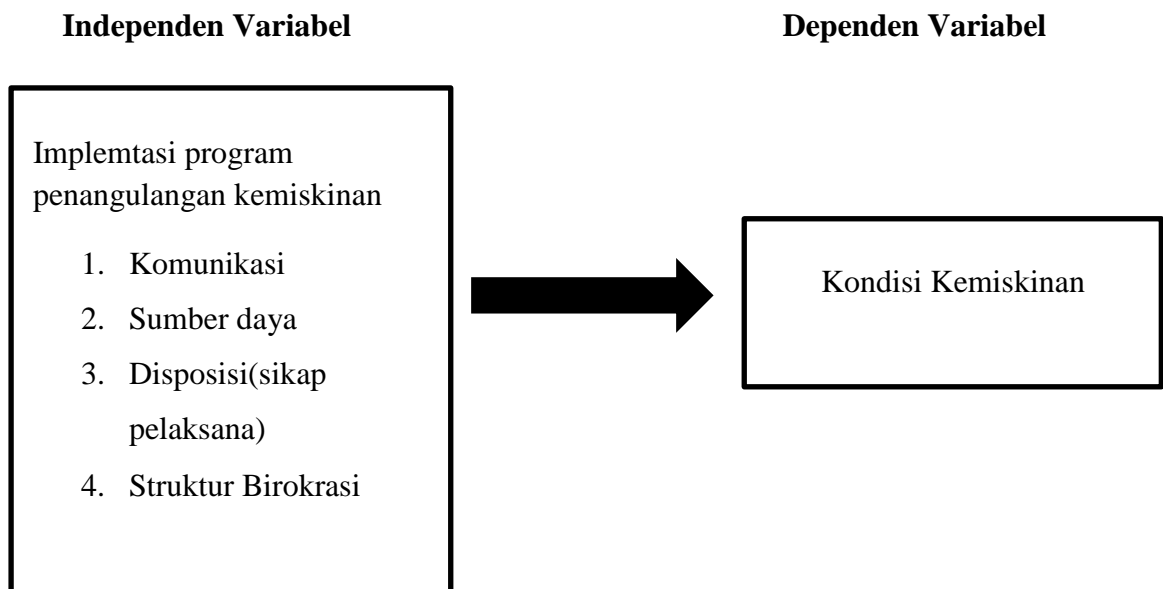
Berdasarkan paparan model Implementasi diatas, penulis ingin menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, model ini yang paling cocok dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong tahun 2016 , kebijakan harus memiliki sasaran dan standar yang ingin dicapai oleh pelaksana kebijakn pada dasarnya merupakan penilaian terhadap standar dan sasaran tingkat ketercapaiannya. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Bersadarkan hal tersebut dalam pengimplementasian kebijakan penanggulangan kemiskinan harus menggunakan variable yang sesuai dan menunjang proses pelaksanaan program yang dibuat yakni menggunakan Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi penganggulangan kemiskinan karena dengan variable tersebut adanya pendekatan pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga sasaran yang dituju (masyarakat) mampu ikut serta dalam

mendukung program yang dibuat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

G. Kerangka Teoritik

Gambar 1.6
Kerangka Teoritik



H. Hipotesis

H1 = Terdapat pengaruh antara kominikasi (X1) terhadap kondisi kemiskinan (Y)

H2 = Terdapat pengaruh antara Sumber daya (X2) terhadap kondisi kemiskinan (Y)

H3 = Terdapat pengaruh (X3) antara Disposisi (sikap pelaksana) terhadap kondisi kemiskinan (Y)

H4 = Terdapat pengaruh (X4) antara Struktur Birokrasi terhadap kondisi kemiskinan (Y)

H5 = Secara bersama-sama Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan.

I. Definisi Konseptual

1. Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan.
2. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang berada dalam keadaan kekurangan sandang, pangan, papan, pendidikan dan ketidaklayakan hidup menurut standar tertentu. Kemiskinan tidak hanya didefinisikan berupa materi saja tetapi juga banyak hal yang lebih kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang luas dalam menyerap apa yang didefinisikan sebagai kemiskinan.
3. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

J. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan landasan yang dapat memberikan penjelasan dan batasan mengenai permasalahan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini variable yang berperan dalam Implementasi Penanggulangan Kemiskinan diukur dengan:

1. Indikator-indikator kondisi kemiskinan
 - a. Jumlah Tanggungan Keluarga
 - b. Pendidikan dan Keterampilan Rendah
 - c. Pendapatan Rendah

d. Kepemilikan Sarana Produksi yang masih sederhana dan Etos kerja

2. Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan

a. Komunikasi

- a) Transmisi Komunikasi yaitu terkait dengan alur SOP pelaksana
- b) Kejelasan informasi dan konsistensi pelaksana program terkait dengan usaha pelaksanaan dalam memberikan peran atas kebijakan pengentasan kemiskinan.

c) Konsistensi

b. Sumber daya

Sumber daya material yaitu terkait dengan alokasi dana dan fasilitas dalam pelaksanaan program.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Dukungan, respond dan feedback pelaksana yaitu terkait dengan sikap pelaksanaan, pelayanan pelaksanaan, feedback, sikap pemahaman pelaksana dan pelaksanaan program.

d. Struktur Birokrasi

- a) Standar Operating Prosedur (SOP)
- b) Fragmentasi

K. Metode Penelitian

Penelitian metodologi berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi

untuk panduan berfikir yang sistematis supaya mampu memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *mix methods* yaitu metode penelitian yang menggabungkan 2 bentuk langkah pendekatan dalam penelitian, yaitu langkah penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif penggabungan kedua metode ini diharapkan mendapatkan data yang lebih valid, realible, objektif dan kompresif. Penelitian campuran dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memfokuskan ke dalam permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan desain deskriptif, dimana sebuah penelitian tersebut memberikan gambaran secara cermat terhadap kelompok maupun individu mengenai kondisi dan gejala yang terjadi Koentjaraningrat (dalam Putri, 2013).

Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap, menurut Creswell (2010: 313) strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah menumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.
- b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan

menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan data kuantitatif dan menganalisisnya pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.

- c. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

Seperti yang disebutkan diatas, dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran bertahap (*sequential mixed methods*) terutama strategi eksplanatoris sekuensial. Jadi, tahap pertama melakukan wawancara lalu menganalisis data kualitatif. Yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi kemiskinan dan untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner yang tujuannya untuk menganalisis data kuantitatif untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Daerah yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Desa Argomulyo, Desa Srihardoni dan Desa Terong. Beberapa alasan dan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan ketiga desa tersebut merupakan desa dengan presentase angka kemiskinan di kabupaten Bantul, selain itu ditiga desa tersebut telah menerapkan

program-program penanggulangan kemiskinan namun program tersebut dianggap kurang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa dalam penelitian ini difokuskan pada subyek yang memahami langsung tema penelitian yakni penelitian ini akan mengkaji Implementasi Penanggulanagn kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardoni dan Desa Terong. Karena itulah penelitian ini terkait langsung diantara nya dengan Kecamatan, Kelurahan dan Tim penanggulangan kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardoni dan Desa Terong.

4. Jenis Dan Sumber Data

Agar dapat mengidentifikasi sumber data yang akan digunakan penulis melakukan pembagian sumber data menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Moleong (2010), data primer merupakan informasi/data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Data primer digunakan untuk mengetahui fenomena penelitian secara mendalam dengan pendekatan terhadap obyek penelitian. Data-data yang didapat langsung dari lapangan berupa pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sedayu, Pundong dan Dlingo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua data informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melalui laporan/buku/catatan/dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan keadaan konsep penelitian era dengan permasalahan penelitian yang dijadikan sebagai obyek penelitian, diantaranya tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan potensi wilayah. Data skunder untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai acuan dari data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat pengumpulan data yang mendukung penekitian. Untuk memeperoleh data yang relevan, digunakan cara pengumpulan data, yaitu:

- a) Wawancara (interview) merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan secara langsung, merupakan alat pengumpulan data atau informasi yang langsung tentang berbagai jenis data social terpendam maupun manifest. Wawancara ini di lakukan dengan badan keuangan dan asset daerah; dengan secretariat daerah untuk memperoleh data dan informasi yang di peroleh sesuai dengan judul penelitian
- b) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang ada dalam catatan atau pembukuan dari instansi atau lembaga yang ada hubungannya dalam penelitian ini.

c) Kuesioner/Angket Menurut Arikunto (2007) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti hal-hal yang ia ketahui. Dengan kata lain kuesioner adalah daftar pertanyaan yang berupa tulisan yang diberikan kepada kelompok orang mengenai suatu masalah sehingga mendapatkan informasi tentang masalah tersebut. Dimana dalam menentukan responden harus memilih populasi dan sampel penelitian yang sesuai sehingga mampu mendapatkan informasi yang sesuai. Kedua komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu-satuan individu atau unit analisa. Dimana target dari populasi penelitian ini yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian (Sukmadinata, 2007: 250). Populasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang meliputi masyarakat setempat, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan aparatur desa baik anggota di kecamatan dan maupun di kelurahan. Dimana diketahui populasi di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono Kecamatan Pundong dan Desa Terong Kecamatan Dlingo sebagai berikut:
Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan :

- a) Kecamatan Sedayu 7 orang
- b) Kecamatan Pundong 7 orang
- c) Kecamatan Dlingo 7 orang

Tim penanggulangan kemiskinan tingkat desa :

- a) TKPK Desa Argomulyo 5 orang
- b) TKPK Desa Srihardono 5 orang
- c) TKPK Desa Terong 5 orang

Kartu keluarga miskin

- a) KK miskin di desa Argomulyo 522 orang
- b) KK miskin di desa Srihardono 767 orang
- c) KK miskin di desa Terong 660 orang

Dari data di atas dapat dijumlahkan menjadi 1985 orang

b. Sampel

Sampel merupakan suatu proses pemilihan dalam penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian (Sukmadinata, 2007: 252). Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk dalam memilih sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Sukmadinata, 2007: 251). Sampel dalam penelitian ini adalah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan aparatur desa meliputi anggota di Kecamatan dan Kelurahan yang mengantur kebijakan penanggulangan kemiskinan. Menurut

Arieandy (2012) apabila populasi lebih dari 100, maka sampel yang diambil 15% atau 20-25%. Sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di kecamatan Sedayu, Pundong dan Dlingo. Dimana sampel yang diambil dari populasi harus representatif. Berdasarkan populasi tersebut maka penentuan sampel yang *representatif* dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *sampling probability sampling* dengan teknik *sampling* acak sederhana. *Sampling* acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Sugiyo (2001 : 57) menjelaskan secara jelas mengapa teknik *Simple Random Sampling* dikatakan *simple* atau sederhana hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan sampel anggota popu;asi dilakukan dengan cara acak tanpa memerlukan perhatian lebih terkait dengan tindakan atau starata yang ada dalam populasi tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan perhitungan jumlah sample, populasi dan batas toleransi kesalahan 10% (*error tolerance*). Perhitungan dengan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = N/(1+N.e^2)$$

$$n = 1985/(1+1985.0,1^2)$$

$$n = 1985/(1+1985. 0,01)$$

$$n = 1985/(1+19,85)$$

$$n = 1985 / 20,85$$

$$n = 95,20383693$$

maka n dibulatkan menjadi 96

keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) 10%

Hasil dari perhitungan rumus slovin sebanyak 96 kuesioner. Yang kemudian dikalikan dengan setiap presentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Desa Srihardono Kecamatan Pundong dan Desa Terong Kecamatan Dlingo.

Tabel 1.5
Sampel Penelitian

Nama Desa	Distribusi Kuesioner
Argomulyo	32
Srihardono	32
Terong	32

Sumber : data hasil wawancara (diolah)

6. Teknik Pengukuran

a. Skala Pengukuran

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk menentukan persepsi seseorang tentang penelitian social yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, dimana hal ini disebut sebagai

variabel penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Variabel ini digunakan untuk menjabarkan instrument yang berupa pertanyaan-pernyataan yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena social, Sugiyono (2014: 93). Dimana Alternatif Jawaban Variabel Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Argomulyo, Desa Srihardono dan Desa Terong, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Alternative

- a) Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5
 - b) Setuju (S) dengan nilai 4
 - c) Kurang Setuju (KS) dengan nilai 3
 - d) Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2
 - e) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1
- b. Instrument penelitian
- Penyusunan angket (kuesioner), menggunakan instrument Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan campuran, yakni kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini

digunakan beberapa langkah-langkah untuk menganalisis data, diantaranya:

a. Analisis data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari data *reduction*, penyajian data, dan data *conclusion drawing/verification*. Sugiyono (dalam Sirnayatin, 2013). Adapun yang dimaksud dengan paparan di atas ialah:

a) Reduksi

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Langkahnya ialah memetakan dan mensinkronkan jawaban narasumber dengan pertanyaan yang diajukan, misalnya pertanyaan yang bertujuan mendapatkan jawaban perihal motif akan dipilah jawaban yang sesuai sebagai bahan analisa. Bila jawaban tidak sesuai atau melenceng dari pertanyaan, maka jawaban tersebut disimpan sebagai perbandingan atau triangulasi data.

b) Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penulis berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan

pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Pengkodean berisi informasi-informasi, baik dari sumber primer dan sekunder, yang memiliki hubungan dengan latar, topik dan subjek penelitian. Langkah ini kemudian dilakukan dengan cara mencocokkan teori yang dipakai dan temuan data di lapangan. Pengkodean atau pengelompokan ini dilakukan untuk memilah jawaban yang sama atau hampir sama antar satu narasumber dan narasumber yang lain dalam kesatuan pertanyaan yang sama. Dalam penyajian data, data (hasil wawancara) dari narasumber dan dokumen lain dikelompokkan menjadi beberapa data sekunder dan primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah mensinkronkan data atau jawaban yang diberikan narasumber dan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian, kemudian data (baik tertulis atau tidak tertulis) dan jawaban narasumber disajikan sesuai dengan resume masalah dan teori yang dipakai.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dimaksudkan untuk mencari makna persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Sedangkan verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang

kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini lebih tepat, komprehensif, dan objektif. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah membandingkan data yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai tinggi rendahnya jawaban narasumber dianalisa dengan metodologi dan menggabungkan dengan sumber lain yang relevan. Misalnya data wawancara dari sumber kiai dan santri dianalisis sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain penyesuaian dengan metode, data yang telah dianalisis tersebut disesuaikan lagi (diverifikasi) dengan data dari sumber lain yang relevan untuk menjadi sebuah tulisan utuh.

b. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah poin ke 2 yakni untuk mengetahui sejauh mana peran atau implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan hal tersebut ingin dibuktikan apakah ada keterkaitan pemerintah setempat dan seberapa besar keterlibatan antara variabel tersebut. Keterlibatan tersebut dinyatakan dengan nama koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi *bivariate/product moment pearson*, karena ingin mengukur

keterlibatan diantara hasil-hasil pengamatan dari dua variable yang berdistribusi normal. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, dimana dalam model ini akan ada variable dependen dan variable independen. Jika ada peningkatan dari satu variable, apakah variable berikutnya akan mengikuti atau tidak. Dalam penelitian ini analisis regresi akan melihat apakah jika nanti terjadi peningkatan dalam keterlibatan pegawai dalam perubahan struktur organisasi yang ada, maka akan disertai pula dengan keterlibatan stackholder lainnya. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana yaitu hanya menggunakan 2 variable yaitu variable dependen dan independen.

a) Korelasi

Menurut Sugiyono (2014: 87) metode korelasi adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubungkan-hubungkan antara satu unsur atau element dengan unsur atau element lain untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara tingkat kemiskinan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Nilai korelasi populasi (ρ) berkisar pada interval $-1 \leq \rho \leq 1$. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah.

Sebaliknya, jika korelasi berniali negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah.

b) Regresi

Analisis Regresi adalah salah satu metode yang sangat populer dalam mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih. Menurut Nazir (2014) analisis regresi ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Dalam analisis regresi, 4 usaha pokok akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris;
- b. Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi variabel independen;
- c. Menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak; dan
- d. Melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter cocok dengan teori.

Dalam analisis regresi, dipikirkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah dalam bentuk linear. Analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, dimana dalam model ini akan ada variabel dependen dan variabel independen. Jika ada peningkatan dari satu variabel, apakah variabel berikutnya akan mengikuti atau

tidak. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana yaitu hanya menggunakan 2 variabel dependen dan independen. Variabel-variabel yang dikomputasi selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel independen yang biasanya dinotasikan dengan huruf X dan variabel dependen yang biasanya dinotasikan dengan huruf Y. Variabel variabel independen yang dinotasikan sebagai X dikenal sebagai variabel bebas, tak tergantung atau predictor sedangkan variabel dependen yang selanjutnya dinotasikan Y juga dikenal sebagai variabel tak bebas, tergantung, respon atau pun outcome. Banyaknya variabel dependen harus sama dengan 1 untuk analisis regresi, sebab dalam analisis ini kita akan mencari hanya satu nilai variabel berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang jumlahnya bisa lebih dari 1. Rumus regresi linier sederhana : $Y = a + bX + e$

Keterangan :

Y = variabel bergantung (dependent variable)

X = variabel bebas (independent variable)

a = konstanta regresi

b = slope atau kemiringan garis regresi

e = error